

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Ainuddin, 2020, *Hukum Acara Pidana Dari Teori ke Praktek*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2013, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Cet. III*, Kencana, Jakarta.
- Bruggink, J.J. H., alih bahasa oleh B. Arief Sidharta, 2011, *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar Tentang Teori Hukum, Cet. III*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2011, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan Hukum Dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat, Ed. I, Cet. II*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Effendy, Marwan, 2005, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Garner, Bryan A., 2009, *Black's Law Dictionary, Ninth Edition*, Thomson Reuters, St. Paul, Minn.
- Hamzah, Andi, 2022, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi II, Cet. XIV*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, & Irdan Dahlan, 1987, *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana, Cet. I*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi II, Cet. XV*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2017, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Edisi II, Cet. XVIII*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hadi, Sutrisno, 2016, *Metodologi Riset, Cet. II*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hiarej, Eddy O.S., 2009, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.

- \_\_\_\_\_, 2020, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi, Cet. V*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2020, *Materi Pokok Hukum Acara Pidana, Edisi I, Cet. IV*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.
- Kaligis, O.C., 2019, *Petunjuk Peninjauan Kembali, Edisi I, Cet. I*, P.T. Alumni, Bandung.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang, 2013, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi, Edisi II, Cet. III*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Manan, Bagir, 1994, *Dasar-Dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
- Marpaung, Leden, 2000, *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2019, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cet. XIV*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet. I Edisi VIII*, Liberty, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Edisi V, Cet. IV*, Liberty, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Edisi II, Cet. VI*, Liberty, Yogyakarta.
- Mochtar, Zainal Arifin & Eddy O.S. Hiariej, 2021, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Red & White Publishing, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, H. Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- \_\_\_\_\_ & Barda Nawawi Arief, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Cet. II*, P.T. Alumni, Bandung

- Mulyadi, Lilik, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan, Cet. IV*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- ND., Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Pangaribuan, Luhut M.P., 2013, *Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat di Pengadilan: Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali, Edisi Revisi, Cet. II*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta.
- Prasetyo, Ridwa Eko, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Pustaka Setia, Bandung.
- Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, 2012, *Peninjauan Kembali Putusan Pidana Oleh Jaksa Penuntut Umum*, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2015, *Pembatasan Penggunaan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana*, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Reksodiputro, Mardjono, 2020, *Sistem Peradilan Pidana*, Rajawali Pers, Depok.
- Rening, Stefanus Roy, 2019, *Pembaharuan Politik Hukum PK dalam Perkara Pidana dan Perlindungan HAM di Indonesia: Pendapat Ahli Sebagai Novum*, Pelita, Indonesia.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum, Cet. III*, UI Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, & Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Ed. I, Cet. XIX*, Rajawali Pers, Depok.
- Soeparman, H. Parman, 2009, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan, Cet. II*, Refika Aditama, Bandung.
- Soepomo, R, 2002, *Sistem Hukum di Indonesia: Sebelum Perang dunia II*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Sumardjono, Maria SW., 2019, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Tresna, R. 1957, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, W. Versluys, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2699).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 Tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2767).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1969 Nomor: M.A/Pemb/1071/69. Tanggal 19 Juli 1969.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971 Tanggal 13 November 1971.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Tanggal 1 Desember 1980.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1982 tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 1980 Yang Disempurnakan Tanggal 11 Maret 1982.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor: 10/Bua.6/Hs/SP/VI/2009 Tanggal 12 Juni 2009.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Nomor: 165/Bua.6/Hs/SP/XII/2014 Tanggal 31 Desember 2014.

### C. Artikel Jurnal:

Arfa, Nys., Syofyan Nur, Tri Imam Munandar, "Pengaturan Peninjauan Kembali Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. IV, No. 1, Juni 2020.

Ariyanto, Yading, "Hak Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Peninjauan Kembali Dalam Perspektif Keadilan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, September 2015.

Astuti, Sri Ayu, Yenny Nuraeni, "Kewenangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dalam Melakukan Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali) Ditinjau Dari Hukum Pidana (Studi Kasus Djoko Chandra), *PAJOUL (Pakuan Justice Journal Of Law)*, Vol. I, No. 2, Juli-Desember 2020.

Azmi, M. Rizki, Fitri Wahyuni, "Meninjau Kewenangan Jaksa Sebagai Penuntut Umum Terhadap Peninjauan Kembali Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia", *Jurnal Selodang Mayang*, Vol.VIII No. 3, Desember 2022.

- Bulan, Noven Verderikus, “Dasar Pertimbangan Penuntut Umum Dalam Pengajuan Peninjauan Kembali Perkara Pidana (Putusan MA No. 70/Pid.B/2010/PN.Kpg tanggal 21 Juni 2010)”, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. XLIII, No. 3, Juli 2014.
- Chakim, M. Lutfi, “Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. XII, No. 2, Juni 2015.
- Cherya, Cindy, “Antara Keadilan Dan Kepastian Hukum: Konflik Yudisial Mahkamah Agung–Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Peninjauan Kembali)”, *Problematika Hukum*, Vol. 4 Nomor 2, 2020.
- Damayanti, Fitria Indah, Hari Soeskandi, “Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali”, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. II, No. 2, Mei-Agustus 2022.
- Fajarwati, Meirina, “Validitas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. XIV, No. 2, Juni 2017.
- Fauzi, Ahmad, “Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) Oleh Jaksa Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 3, No. 1, Maret 2014.
- Gumbira, Seno Wibowo, “Problematika Peninjauan Kembali Dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pasca SEMA RI No. 7 Tahun 2014 (Suatu Analisa Yuridis Dan Asas-Asas Dalam Hukum Peradilan Pidana)”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. XLVI, No. 1, Januari-Maret 2016.
- Gunarto, Marcus Priyo, “Mengembalikan Pelaksanaan Peninjauan Kembali Sesuai Asas Hukum”, *Mimbar Hukum*, Vol. XXI, No. 3, Oktober 2009.
- Hendrawan, Dady, “Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana”, *The Juris*, Vol. I, No.2, Desember 2017.
- Hikmawati, Puteri, “Kontroversi Surat Edaran Mahkamah Agung Mengenai Pengajuan Peninjauan Kembali Satu Kali” *Info Singkat Hukum*, Vol. VII, No. 1, Januari 2015.



- Lalamentik, Einstein E., “Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Lex Administratum*, Vol. VI, No. 3, Juli-Agustus 2018.
- Machmudin, Dudu Duswara, “Optimalisasi Peran Hakim Agung dalam Penyelesaian Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. XII, No. 2, Juni 2015.
- Mansay, Fildo M. S. A., “Perlindungan Hak Terpidana Dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali”, *Lex Crimen*, Vol. II, No. 5, September 2013.
- Muhlizi, Faiz Arfan, “Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Yang Berkeadilan Dan Berkepastian Hukum: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013”, *Jurnal Yudisial*, Vol. VIII, No. 2, Agustus 2015.
- Nur, Syarifa, "Aspek Yuridis Tentang Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali) Terhadap Putusan Yang Berkekuatan Tetap", *Legal Opinion*, Vol. 4, No. 2, 2016.
- Putra, I.G.M.AM., N.M.Y. Griadhi, “Pertentangan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/ PUU-XI/ 2013 Terkait Peninjauan Kembali”, *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. III, No. 2, Mei 2015.
- Rajagukguk, Samuel Bona Tua , Umi Rozah, Irma Cahyaningtyas, “Analisis Yuridis Normatif Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 Tentang Uji Materi Pengujian Pasal 263 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. VIII, No. 3 2019.
- Ridha, Muhammad, “Redesain Legal Standing Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Penuntut Umum Demi Mewujudkan Keadilan Hukum”, *Syntax Idea*, Vol. III, No. 5, Mei 2015.
- Sakti, Yayang Susila, “Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Penuntut Umum: Antara Kepastian Dan Keadilan”, *Arena Hukum*, Vol. VII, No. 1, 2014.
- Singal, Priscilia, “Fungsi Lembaga Peninjauan Kembali Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, *Lex et Societatis*, Vol. I, No. 2, April-Juni 2013.
- Suhariyanto, Budi, “Pelenturan Hukum Dalam Putusan Peninjauan Kembali Yang Diajukan Oleh Jaksa Penuntut Umum: Kajian Putusan



Mahkamah Agung Nomor 57 PK/Pid/2009”, *Jurnal Yudisial*, Vol. VIII No. 2, Agustus 2015.

Sutrisno, Slamet Prasetyo, F.W. Perdana, Surnata, Y. Wibisono, B. Setiawan, “Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali dalam Perspektif Hukum Progresif”, *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. II, No. 12, 2021.

Swantoro, Herri, Efa Laela Fakhriah, Isis Ikhwansyah, “Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Kedua Kali Berbasis Keadilan dan Kepastian Hukum”, *Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 2, Juni 2017.

Yuniagara, Riki, “Penggunaan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 Dalam Penolakan Peninjauan Kembali: Kajian Putusan Nomor 144 PK/Pid.Sus/2016”, *Jurnal Yudisial*, Vol. XIII, No. 2, Agustus 2020.

Yuniagara, Riki, Eddy Purnama, M. Saleh Sjafei, “Kekuatan Hukum Mengikat SEMA No. 7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. XIX, No. 1, April 2017.

#### **D. Karya Ilmiah:**

Andra, Rahmadianto, 2021, “Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) Oleh Penuntut Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016”, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta.

Budiarta, I Wayan, 2013, “Problematisasi Yuridis Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Melakukan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana”, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember.

Darmawan, Ristu, 2012, “Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana”, *Tesis*, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Devita, Suci, 2022, “Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Pengadilan Berkekuatan”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi.

Mangasih, Timbul, 2016, “Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013”, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

- Maulidya, Dinda Rahmitha, 2016, “Urgensi Haksa Penuntut Umum Mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Nahason, 2009, “Dasar Pembenaar Mahkamah Agung Menerima Peninjauan Kembali Yang Diajukan Jaksa Penuntut Umum Dengan Terdakwa Pollycarpus”, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Pratama, Virga Riski, 2020, “Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Agung (Studi kasus Djoko Tjandra, Putusan PK Nomor 12PK/Pid.Sus/2009)”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- Poluakan, Piere Hugo, 2021, “Ratio Legis Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Pemasayarakatan”, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Setyoningrum, Dwi Agus, 2018, “Relevansi Hak Terpidana Mati Dalam Pengajuan Peninjauan Kembali Dan Grasi Terhadap Kepastian Hukum Eksekusi Pidana Mati”, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sumito, Nikita Lydia Noviani, 2018, “Pengajuan Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Penuntut Umum”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, Surabaya.
- Wiwekananda, I Dewa Made Krishna, 2021, “Eksistensi Bukti Baru (Novum) Dalam Permohonan Peninjauan Kembali Perkara Pidana”, *Tesis*, Program Studi Magister Hukum Litigasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Yusnidhar, Atrya, 2010, “Studi Komparasi Hukum Model Pengaturan Asas-Asas Peninjauan Kembali Putusan Menurut KUHAP Dengan *Article 203 dan 204 Criminal Procedure Law of The People’s Republic of China No. 64*”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta.

#### **E. Putusan Pengadilan:**

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 275 K/Pid/1983 Perihal Kasasi perkara Raden Sonson Natalegawa, 15 Desember 1983.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 55 PK/Pid/1996 Perihal Peninjauan Kembali perkara Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A., 25 Oktober 1996.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 PK/Pid/2000 Perihal Peninjauan Kembali perkara Ram Gulumal al. V. Ram, 02 Agustus 2001.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 PK/Pid/2006 Perihal Peninjauan Kembali perkara Soetiyawati, 19 Juni 2006.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 109 PK/Pid/2007 Perihal Peninjauan Kembali perkara Pollycarpus Budihari Priyanto, 25 Januari 2008.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pid/2009 Perihal Peninjauan Kembali perkara Nyayu Saodah, 13 Oktober 2009.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pid/2021 Perihal Peninjauan Kembali perkara Hartono, S.H., 13 15 September 2021.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Perihal Uji Materi Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 06 Maret 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 Perihal Uji Materi Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 12 Mei 2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 Perihal Uji Materi Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 14 April 2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 Perihal Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 25 November 2021.

#### **F. Internet:**

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, KBBI Daring, "Peninjauan Kembali"  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peninjauan%20kembali>, diakses pada tanggal 18 November 2022.

HukumOnline.com, “Dalam Kasus Akbar, Hak Jaksa untuk Ajukan PK Dipertanyakan”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dalam-kasus-akbar-hak-jaksa-untuk-ajukan-pk-dipertanyakan-hol9704?page=1>, diakses pada tanggal 16 Juni 2022.

\_\_\_\_\_, “Sesuai Asas Keadilan, Jaksa Bisa Ajukan PK”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sesuai-asas-keadilan-jaksa-bisa-ajukan-pk-lt4c500dc410d8e/>, diakses pada tanggal 6 Juli 2023.

Kejaksaan RI, “Sejarah Kejaksaan”, <https://www.kejaksaan.go.id/pages/sejarah>, diakses pada tanggal 14 Juli 2023.